



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : BADAN PENDAPATAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RAHMAT GUNAWAN
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
3. NHK : 455821

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.060.000.000

1. Tanah Seluas 826 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI
Rp. 150.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/198 m2 di KAB / KOTA
SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/21 m2 di KAB / KOTA
SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/21 m2 di KAB / KOTA
SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. Tanah Seluas 2327 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI
Rp. 100.000.000
6. Tanah Seluas 372 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI
Rp. 30.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 105.500.000

1. MOTOR, HONDA KARISMA SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL
SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 98.000.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO 2BJ Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
4.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 30.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 11.758.774



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.207.258.774
III. HUTANG	Rp.	468.918.816
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	738.339.958

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.